

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan disisi lain dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan kordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sisitem pembayaran.<sup>1</sup>

Salah satu pelaksanaan tugas Bank Indonesia adalah dibidang sistem pembayaran yang bisa dikatakan telah berakar sejak masa *De Javasche Bank* (DJB). Sebagai bank sirkulasi untuk Bank Hindia Belanda, De Javasche Bank telah berpengalaman dalam melaksanakan sisitem pembayaran, baik pembayaran tunai, maupun pembayaran non tunai. Ketika *De Javasche Bank* berganti menjadi Bank Indonesia pada 1 juli 1953, tugas pelaksanaan sisitem pembayaran itu kembali dimantapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 atau Undang-Undang pokok Bank Indonesia 1953 pada pasal 7 ayat 2 sebagai berikut: “Bank menyelenggarakan pencedaran uang itu terdiri dari uang kertas bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri”. Sejak saat itu Bank Indonesia

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2014), ,h.106.

menyelenggarakan pengedaran uang melalui jaringan kantor-kantor cabangnya ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Pentingnya keberadaan suatu sistem pembayaran yang efisien, aman, dan handal bagi suatu perekonomian maka sejak awal tahun 1990 an isu mengenai sistem pembayaran ini telah mulai menjadi perhatian serius bank-bank sentral karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan efektivitas tugas pokok bank sentral. Saat ini hampir semua bank sentral menempatkan sistem pembayaran sebagai salah satu bidang dalam tugas pokoknya.

Sasaran dari fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran oleh bank sentral adalah terciptanya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Pengertian sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat mendukung keberhasilan suatu negara dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter.

Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung aktivitas perekonomian di suatu negara dan oleh karena itu sistem pembayaran harus senantiasa dijaga agar dapat berjalan secara aman dan efisien. Keaman dalam kegiatan sistem pembayaran dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur dalam kegiatan sistem pembayaran yang handal dan aman dari segala bentuk *fraud*.
2. Tersedianya aturan hukum yang memberikan pengaturan yang jelas dan adil untuk seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

---

<sup>2</sup>Kusuma Erwin,dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Medan: Sarana Media, 2012), h. 95.

3. Tersedianya sistem yang handal dalam pemrosesan transaksi sistem pembayaran yang antara lain dibuktikan dengan tingkat ketersediaan sistem yang maksimal serta kepastian penyelesaian transaksi.
4. Tersedianya *back-up system* yang menjamin kelangsungan kegiatan sistem pembayaran yang aman.

Sedangkan sistem pembayaran yang efisien ditunjukkan melalui berbagai indikator antara lain:

1. Tersedianya infrastruktur sistem pembayaran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyedia sistem.
2. Tersedianya layanan sistem pembayaran yang cepat, mudah diakses dan murah untuk seluruh lapisan masyarakat.
3. Mekanisme penyelesaian pembayaran yang praktis dan cepat.

Pada prinsipnya, kelima komponen utama dalam sistem pembayaran yaitu aturan, lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur yang merupakan satu kesatuan utuh dalam sistem harus selalu dikembangkan dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi yang mendasari perkembangan sistem pembayaran dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang semakin aman dan efisien.<sup>3</sup>

Dalam sistem pembayaran Bank Indonesia berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran misalnya, peran sebagai penyelenggara kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak

---

<sup>3</sup>Ade dkk, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang 2012* (Jakarta: Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Departemen Pengelolaan Uang, 2013), h.3

mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung di loket-loket penukaran seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Sesuai Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia menyelenggarakan pelayanan perkasan di setiap satuan kerja kas berupa penerimaan setoran dan penarikan uang kepada masyarakat dan perbankan. Selain itu Bank Indonesia menyediakan pelayanan kas di luar kantor berupa kas keliling, kas titipan dan kerjasama penukaran dengan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2004, Bank Indonesia bertanggung jawab dan memiliki wewenang di dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui pengawasan sistem pembayaran.<sup>5</sup>

Pengawasan sistem pembayaran sebagai salah satu fungsi Bank Sentral yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran yang dilakukan melalui monitoring, melakukan penilaian terhadap penyelenggara berdasarkan kesesuaian dengan tujuan

---

<sup>4</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 06-04-2018, pukul 14.04

<sup>5</sup> Tim Manajemen Informasi dan Administrasi, *Pengawasan Sistem Pembayaran* (Jakarta:DASP,2006), h.2

keamanan dan efisiensi serta mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pembayaran.

Pengawasan sistem pembayaran diperlukan untuk menghindari kemungkinan kegagalan keberlangsungan sistem pembayaran yang dapat ditimbulkan dari pihak internal, eksternal, pengaruh jaringan atau praktek monopoli.<sup>6</sup>

Berdasarkan yang saya amati selama melaksanakan praktek kerja lapangan/magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, terdapat kesalahan yang pernah terjadi pada pelayanan kas yaitu selisih antara uang masuk dan uang keluar. Yang dimaksud dengan uang masuk adalah uang transaksi penukaran atau penggantian uang dari masyarakat maupun bank umum. Sedangkan yang dimaksud dengan uang keluar adalah modal yang dikeluarkan oleh KpwBI Prov. Sumut untuk transaksi penukaran atau penggantian uang ke masyarakat ataupun bank umum. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya ketelitian atau *human error*. Meskipun mereka mempunyai SOP (sistem operasional) sendiri tetapi kesalahan selisih kas ini tidak bisa dihindari selamanya karena ini merupakan hal yang lazim terjadi di setiap perusahaan. Hal ini jarang terjadi secara terus-menerus, walaupun jarang tapi sekali waktu bisa terjadi. Yang namanya kesilapan dan kekhilafan pasti terjadi disetiap manusia.

Maka dengan landasan pemikiran tersebut, mendorong keinginan saya untuk membahas bagaimana peran manager kasir dalam melakukan pengawasan pada layanan kas di Bank Indonesia. Untuk itu saya memilih judul **“Peranan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Layanan Kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”**.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 1

Berdasarkan judul yang diambil, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan selisih kas pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana peranan manajer kasir dalam melakukan pengawasan secara operasional terhadap pegawai pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh manager kasir dan petugas kasir ketika terjadi masalah selisih kas antara uang masuk dan uang keluar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya masalah selisih kas antara uang masuk dan uang keluar pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran manajer kasir terhadap kinerja pegawai dalam melakukan pengawasan secara operasional pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk dapat memahami secara langsung upaya apa yang dilakukan manajer kasir dan petugas kasir ketika selisih kas terjadi pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis dapat mengambil pengetahuan mengenai faktor yang menyebabkan selisih kas, pengawasan secara operasional, dan upaya yang dilakukan ketika terjadi

selisih kas pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan teori yang saya peroleh melalui buku-buku perkuliahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Memberikan masukan yang bermanfaat kepada pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengawasan secara operasional terhadap kinerja pegawai.
3. Dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak lain yang membutuhkan dalam melakukan penelitian dengan isi pokok bahasan yang sama dimasa yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam hal ini pengumpulan data atau bahan-bahan yang dipergunakan penulis untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang digunakan dalam bentuk uraian kata-kata dan laporan kualitatif.

##### **2. Jenis Data**

*Field Research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dengan metode wawancara dengan Bapak Irvan Efendi sebagai kasir yunior di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden (objek penelitian). Data primer ini berupa buku “Pengawasan Sistem Pembayaran” sumber

dari Tim Manajemen Informasi dan Administrasi-DASP pada tahun 2006 di Kantor Bank Indonesia Pusat. Dan buku “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang” sumber dari Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang pada tahun 2013 di Kantor Bank Indonesia Pusat.

- b. Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri mengumpulkannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku di perpustakaan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi minor ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode interview (wawancara) langsung dengan Bapak Irvan Efendi sebagai kasir junior di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Metode penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif.

- a. Analisis data adalah proses menyusun serta mengkategorikan dengan maksud memahaminya. Dalam penelitian ini menggambarkan analisis data secara kualitatif.
- b. Sistem penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistem penulisan yang diakui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINSU Medan.

### 5. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian penulis yaitu 1 orang pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Bapak Irvan Efendi sebagai kasir junior.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah dipahami, kemudian penulis membuat skripsi minor ini dalam 5 (lima) bab, setiap bab dibagi sub-subnya sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan peranan pengawasan pada layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara seperti teori peranan, teori pengawasan, teori tentang layanan kas pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

## BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian pekerjaan, visi dan misi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian penulis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diaplikasikan dalam skripsi minor ini.

